

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Berdasarkan konstitusi yang sah yaitu UUD RI Tahun 1945, Indonesia adalah negara kesatuan dengan bentuk pemerintahan republik. Secara geografis, Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau. Hal ini yang membuat Indonesia dikenal dengan keberagamannya, karena tidak hanya disebut sebagai negara dengan banyak kepulauan saja, namun juga memiliki banyak keberagaman seperti adat istiadat, suku, budaya dan bahasa yang berbeda-beda di setiap wilayahnya Wikipedia, (2023).

Selain dikenal sebagai negara kepulauan, Indonesia juga merupakan negara hukum, yang berarti setiap aspek kehidupan di seluruh wilayah NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) harus diatur oleh hukum yang berlaku. Begitupun yang terjadi dalam roda pemerintahan, untuk menjamin bahwa semua urusan pemerintahan berjalan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku, ada peraturan perundang-undangan seperti dalam roda pemerintahan Indonesia. Otonomi daerah menuntut pemerintah untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat berdasarkan akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan keseimbangan hak dan kewajiban untuk mencapai pemerintahan yang baik Masanae et al. (2022).

Menjaga pengelolaan kas dengan baik adalah hal yang sangat penting bagi instansi pemerintah. Kas merupakan hal terpenting bagi suatu

instansi pemerintahan untuk memastikan bahwa negara dapat melaksanakan kegiatannya secara baik. Oleh karena itu, pemerintah dituntut untuk dapat menerapkan prinsip akuntabilitas dalam transaksi keuangan. Untuk melakukannya, berbagai keterampilan dan sumber daya diperlukan, termasuk sumber daya manusia yang terampil dan jaringan berbagai informasi teknologi yang memadai Kartika et al., (2021) dalam Maulidia et al., (2022). Untuk dapat mengelola kas secara baik diperlukan suatu manajemen kas yang memadai.

Pada sektor pemerintah manajemen kas yang sangat penting sebagai pengurang risiko yang dihadapi pemerintah dalam hal operasional, kredit dan pasar. Manajemen kas diperlukan karena adanya ketidaksesuaian kas, antara waktu pembayaran belanja dan ketersediaan kas Utomo (2023). Suatu organisasi harus memiliki kemampuan untuk merencanakan dan membuat sistem akuntansi terhadap kas yang dapat mengurangi bahkan meniadakan kemungkinan penggelapan dan penyalahgunaan uang yang tidak sesuai Irawan (2018). Selain itu, pengeluaran kas merupakan bagian dari sumber daya yang membutuhkan pengawasan dan pengendalian untuk memastikan bahwa telah dilakukan dengan benar dalam pelaksanaannya agar tercapai target dan tujuan, untuk melaksanakan pengelolaan yang efektif terutama dalam hal pengeluaran kas, diperlukan sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian internal yang baik akan membantu dalam menjaga keamanan aset organisasi dan meminimalkan risiko keuangan Saemani (2019).

Pengendalian internal penting bagi perusahaan, karena semua data yang masuk ke perusahaan harus diverifikasi. Contohnya seperti rotasi jabatan, pengajuan cuti, laporan kerja dinas dan lainnya. Sistem pengendalian internal mencakup seluruh prosedur dan alat yang telah ditetapkan untuk melindungi aset dan data perusahaan, memeriksa ketepatan data, meningkatkan efisiensi operasional, dan menjaga peraturan yang telah ditetapkan sebelumnya. Aktivitas dalam pengendalian internal menjadi penting untuk dibahas karena tidak jauh berbeda dengan aktivitas lain seperti berbisnis, produksi, hingga legalitas barang Kamal (2023).

Salah satu sistem yang digunakan dalam instansi pemerintah yaitu PP No. 60 Tahun 2008 tentang SPIP (Sistem Pengendalian Internal Pemerintah). SPIP adalah sistem pengendalian yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. SPIP merupakan sistem yang diterapkan untuk menjaga kekayaan negara, memastikan keandalan laporan, serta mengurangi terjadinya kesalahan atau kecurangan dalam pengeluaran kas Ariyanti et al. (2018). Pada umumnya sistem pengendalian internal diterapkan bukan hanya pada instansi pemerintahan tetapi juga pada organisasi maupun perusahaan, karena instansi pemerintah membutuhkan sebuah sistem pengendalian internal untuk mengawasi setiap kegiatan-kegiatan kas yang ada. Tentu dalam hal ini, tanpa adanya pengendalian internal dapat memudahkan timbulnya masalah-masalah dalam kas terlebih khusus pengeluaran kas sendiri Abdulah et al. (2023).

Sistem pengendalian internal pengeluaran kas harus diterapkan dengan otorisasi dan prosedur pencatatan yang memberikan wewenang manajemen kepada pegawai dan memastikan praktik yang sehat dalam perusahaan Handayani (2020). Sistem informasi pengeluaran kas dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja, memudahkan pegawai mengelola data pengeluaran kas, mempercepat dalam penyajian laporan, dan membantu pimpinan membuat keputusan dengan cepat berdasarkan laporan yang diterima Sabu et al (2023). Prosedur pengeluaran kas perlu dirancang sedemikian rupa, sehingga hanya pengeluaran-pengeluaran yang telah disetujui untuk kegiatan perusahaan saja yang dicatat dalam pembukuan Sambuaga et al (2021).

Menurut Rindengan (2015) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, juga disebut sebagai Sekretariat DPRD adalah suatu unsur pelayanan administrasi terhadap DPRD dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan, yang secara administratif bertanggung jawab atau berada dibawah pimpinan DPRD dan bertanggungjawab kepada Bupati yang dibina oleh Sekretariat Daerah. Sekretariat DPRD memiliki struktur organisasi yang memudahkan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti pada Bagian Program dan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal, terdapat permasalahan yang dialami oleh instansi yaitu adanya keterlambatan penyampaian dokumen SPJ-GU (Surat Pertanggung Jawaban-Ganti Uang)

oleh bagian FP2K (Fasilitas Penganggaran, Pengawasan dan Kerjasama) kepada bendahara pengeluaran untuk proses pencairan dana. Hal ini dapat menyebabkan keterlambatan pengeluaran kas, pengelolaan keuangan, pencairan dana dan keterlambatan dalam pengawasan.

Oleh karena itu, perlu diteliti terkait evaluasi penerapan sistem pengendalian internal pengeluaran kas pada SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal. Pentingnya penelitian ini yaitu untuk mengevaluasi efektivitas dan kepatuhan terhadap prosedur yang telah ditetapkan, karena evaluasi ini dapat membantu dalam mengidentifikasi kelemahan, meningkatkan transparansi serta memastikan pengeluaran kas dilakukan sesuai dengan prosedur, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Proses dan prosedur yang ada dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dan pengalokasian dana pada pemerintah daerah. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, dilakukan penelitian dengan judul **“Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pengeluaran Kas Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan sistem pengendalian internal pengeluaran kas pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal?
2. Bagaimana kendala yang terjadi dalam penerapan sistem pengendalian internal pengeluaran kas pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah disebutkan diatas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan sistem pengendalian internal pengeluaran kas pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal.
2. Untuk mengetahui kendala yang terjadi dalam penerapan sistem pengendalian internal pengeluaran kas pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Sebagai wawasan dan ilmu pengetahuan bagi peneliti untuk mengetahui cara mengevaluasi penerapan sistem pengendalian internal pengeluaran kas pada instansi pemerintahan secara nyata serta pengaplikasiannya di dunia kerja dan meningkatkan kemampuan peneliti untuk membuat karya ilmiah yang lebih baik.

2. Bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada SKPD Sekretariat DPRD tentang prosedur dan kebijakan pemerintah dalam pengambilan keputusan yang efektif untuk perkembangan instansi pemerintah. Selain itu, penelitian ini dapat

membantu Sekretariat DPRD meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem pengendalian internal pemerintahnya.

3. Bagi Politeknik Harapan Bersama

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada literatur akademik tentang penerapan sistem pengendalian internal pengeluaran kas pemerintah daerah. Hasil dari penelitian ini juga dapat berfungsi sebagai dasar untuk kerja sama riset antara kampus dengan instansi pemerintahan terkait.

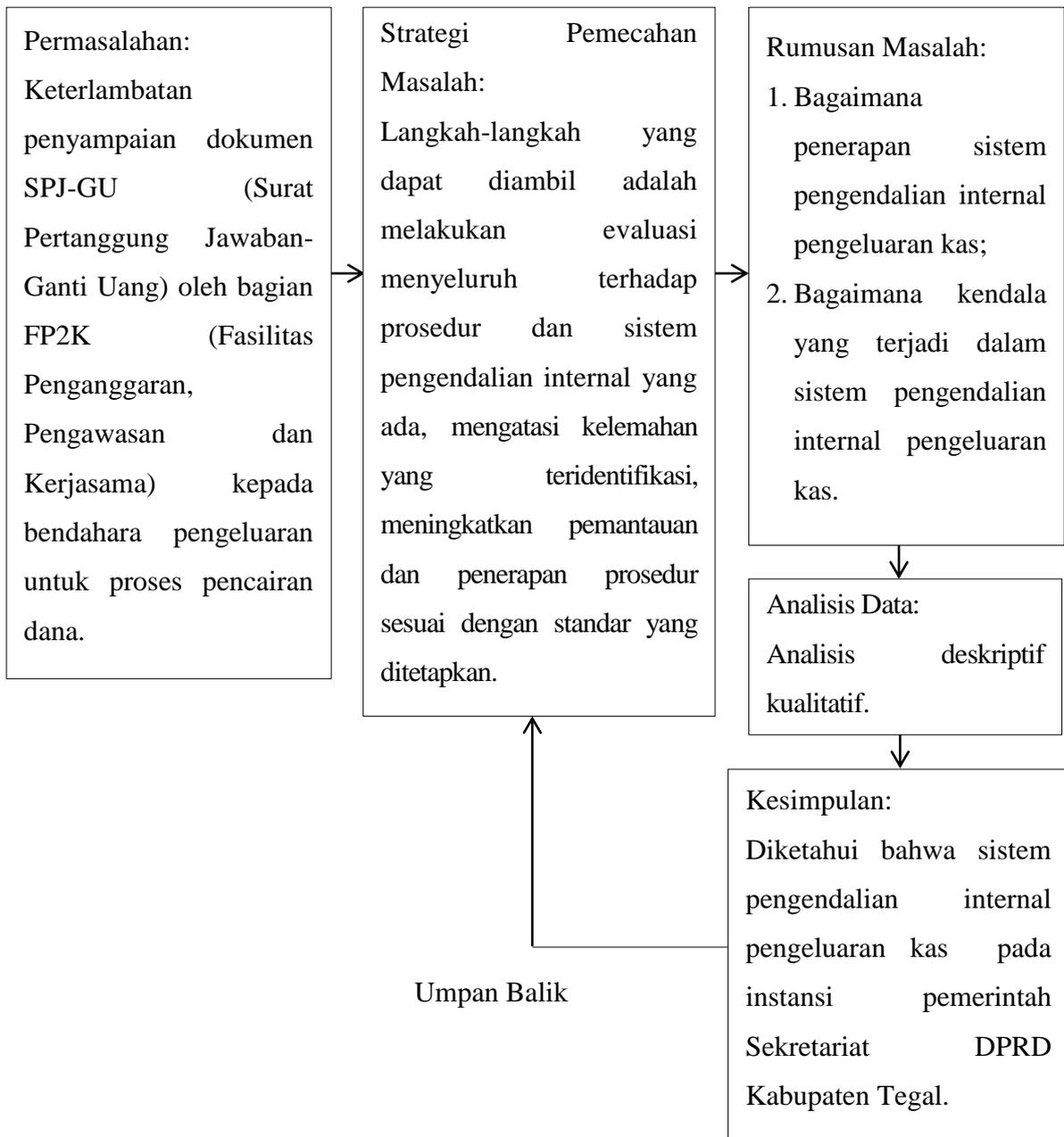
1.5 Batasan Masalah

Penelitian tentang evaluasi penerapan sistem pengendalian internal pengeluaran kas memiliki batas ruang lingkup. Penelitian ini difokuskan pada satu instansi pemerintahan saja yaitu SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal, sehingga hasil penelitian tidak digeneralisasi ke instansi pemerintah yang lain.

1.6 Kerangka Berpikir

Berdasarkan PP No. 60 Tahun 2008 bahwa sistem pengendalian internal pemerintah adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai, untuk memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan organisasi tercapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, pelaporan keuangan yang akurat, perlindungan aset negara dan ketaatan terhadap perundang-undangan. Permasalahan dalam Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal yaitu mengenai keterlambatan penyampaian dokumen SPJ-GU yang dibuat oleh bagian

FP2K kepada bendahara pengeluaran untuk proses pencairan dana. Ini akan menyebabkan informasi keuangan yang tidak akurat, penyimpangan terhadap dana yang dimiliki oleh pemerintah, ketidakpatuhan terhadap prosedur, kebijakan pemerintah dan ketidakpastian pimpinan dalam membuat keputusan untuk kebutuhan pemerintah. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, evaluasi menyeluruh prosedur dan sistem pengendalian internal yang ada harus dilakukan, hal ini akan memperbaiki kinerja, meningkatkan pemantauan, memperbaiki kelemahan dan memastikan bahwa prosedur diterapkan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat dibuat kerangka berpikir sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Berpikir

1.7 Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan dikembangkan untuk membantu penelitian tugas akhir dan memberikan ringkasan terperinci dari penelitian yang akan dijelaskan antara lain:

1. Bagian awal

Bagian awal berisi halaman judul, lembar persetujuan, lembar pengesahan, halaman pernyataan keaslian Tugas Akhir (TA), lembar pernyataan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk akademis, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar dan lampiran. Bagian awal ini berguna untuk memberikan kemudahan kepada pembaca dalam mencari bagian-bagian penting secara cepat.

2. Bagian isi

Bagian isi memiliki lima komponen, termasuk:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, kerangka berpikir dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini memuat teori-teori tentang pengelolaan keuangan daerah, sistem pengendalian internal, kas, pengeluaran kas, prosedur pengeluaran kas dan penelitian terdahulu.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang lokasi penelitian (tempat dan alamat penelitian), jenis data, sumber data, metode pengumpulan data, teknik analisis data, luaran penelitian dan jadwal penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi hasil penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan dari penelitian yang sudah diteliti.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisi hasil dan pembahasan secara spesifik dan masukan dari peneliti untuk pihak yang diteliti.

3. Bagian akhir

Bagian ini berisi daftar pustaka dan lampiran terkait penelitian yang berisi tentang daftar buku dan literatur yang berkaitan dengan penelitian.